



Ada yang Ingin Midji Terjerat Kasus Bansos

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengatakan bahwa ada pihak yang ingin menyeretnya pada indikasi korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kota Pontianak tahun 2006, 2007, dan 2008. "Saya harus



**Saya akan datang.
Tidak perlu izin ini itu.
Insyaallah saya
paparkan sesuai yang
saya alami, saya
ketahui, dan saya
dengar**

Sutarmidji

siap-siap terima serangan itu," katanya, Senin (24/2). Sutarmidji menganggap bukan hal baru jika ada pihak yang ingin menyeretnya dalam kasus ini. Dia sudah berkali-kali dilaporkan kepada penegak hukum terkait kasus tersebut.

• ke halaman 15 kolom 1



Ada yang Ingin Midji Terjerat Kasus Bansos

Sambungan dari halaman 9

"Saya paham betul, tetapi saya tidak mau sebut orangnya," ujarnya.

Sutarmidji mengaku sudah punya firasat tidak nyaman sejak dia menjabat sebagai wakil wali kota pada 2003. Hari pertama masuk kerja saja dia sudah dapat merasakannya. Sutarmidji merasa tidak nyaman. "Saya melihat gelagat-gelagat tersebut makanya saya hati-hati," tuturnya.

Salah satunya adalah marka parkir kepala daerah di depan pintu masuk kantor wali kota. Sutarmidji mengatakan bahwa sebelum dia menjadi wali kota marka parkir di depan pintu masuk ada dua, setelah

dia menjabat jadi wakil wali kota tinggal satu marka. "Itu artinya wakil wali kota tidak boleh parkir di depan kantor," ucapnya.

Serangan tersebut dirasakan Sutarmidji semakin gencar menjelang Pilwako 2008. Menurutnya ada yang ingin dirinya tidak dapat ikut pilwako sebagai calon wali kota. Karena melihat gelagat tersebut Sutarmidji mengemukakan surat pertanggungjawaban penyaluran dana bansos yang dia kelola. Saat ini dia masih menyimpan dengan baik spj dan kuitansi penyaluran bansos tersebut. "Saya pastikan spj dan kuitansi terhadap tiga item penggunaan bansos itu setelah diaudit BPK ada sama

saya. Sengaja saya bawa pulang, takut dihilangkan orang. Kalau dihilangkan habislah saya," ungkapnya.

Sutarmidji menyalurkan sejumlah uang pada bansos 2006. Uang tersebut digelontorkan untuk pembinaan pedagang kaki lima pada Satpol PP sebesar Rp1 miliar, untuk Badan Narkotika Kota Pontianak Rp400 juta, dan Rp400 juta lain untuk pendanaan Bhakti TNI. Kemudian, kembali Sutarmidji menegaskan dia siap mempertanggungjawabkannya. Dia menjelaskan untuk PKL uang bansos digunakan dalam penertiban PKL di atas parit untuk pindah ke Pasar Dahlia. "Ada untuk buat PKL gerobak

juga. Dari Rp1 miliar yang digunakan Rp400 juta," tuturnya. "Tanggung jawab saya tiga hal itu," tambahnya.

Jika Kejaksaan Tinggi Kalimantan memanggil, Sutarmidji menyatakan bahwa dirinya siap datang. Selain memaparkan apa yang diketahuinya Sutarmidji juga akan membawa serta bukti pertanggungjawaban aliran bansos yang dikelolanya. "Saya akan datang. Tidak perlu izin ini itu. Insyaallah saya paparkan sesuai yang saya alami, saya ketahui, dan saya dengar," paparnya. Sutarmidji mengatakan bahwa dia ingin perkara bansos ini cepat tuntas. "Cepat selesai agar semuanya jelas," katanya. *(hen)*